

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Dalam penelitian ini ada beberapa teori yang akan digunakan yang pertama adalah teori pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Theory*) yang menjelaskan bagaimana cara menjaga kestabilan sosial, melestarikan lingkungan hidup serta tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara yang dilakukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yaitu dengan adanya industrialisasi (*Industrialisasi Theory*) dalam teori ini menjelaskan bahwa dengan adanya industri dapat mempengaruhi perubahan pada sektor ekonomi seperti tingkat pendapatan, status pekerjaan, serta distribusi barang dan jasa. Perkembangan suatu industri juga memberikan dampak terhadap lingkungan yang juga akan mempengaruhi ekonomi seseorang atau masyarakat (*Exsternalities Theory*). Selanjutnya dari eksternalitas yang ada maka akan ada bagaimana cara untuk mengurangi eksternalitas yang ada (*Internalizing Theory*)

2.1.1 Teori Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Pembangunan dapat disebut dengan berkelanjutan jika sudah memenuhi kriteria ekonomis, bermanfaat serta dapat menjaga lingkungan hidup. Sejak tahun 1970 konsep pembangunan berkelanjutan terus mengalami perbaikan. Pada tahun 70an konsep pembangunan berkelanjutan di penuhi oleh sektor ekonomi yang disebabkan oleh krisis minyak bumi tahun 1973 dan 1979. Earth Summit di Rio de Janeiro pada tahun 1992 merupakan titik tolak dipertimbangkanya sektor sosial dalam pembangunan berkelanjutan (Teri,2002). Hasil penting dari konferensi ini membentuk komisi pembangunan berkelanjutan (CSD-Commision on Sustainable Development). Kesetaraan akses sumber daya

pada segala aspek sosial dan mengurangi jumlah kemiskinan juga menjadi aspek penting dalam konferensi ini.

Secara konseptual pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) mempunyai arti yang berbeda beda. Menurut Ahasane (2001) pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai *“meets the needs of the present without compromising the capacity to meet the needs of future generations”* berdasarkan pengertian tersebut pembangunan berkelanjutan mempunyai beberapa komponen penting yang harus dipenuhi yakni :

- a) Integrasi lingkungan terhadap proses pembangunan
- b) Pemerataan
- c) Distribusi pengaruh kekuatan dan ekonomi
- d) Bertujuan untuk masa depan
- e) Ketersediaan antisipasi sebelum kegiatan aksi

Penerapan konsep, prinsip dan tujuan dari pembangunan berkelanjutan secara meluas dapat dilakukan dengan menetapkan kaidah kaidahnya (Djajadiningrat,1992;Pearce and Warford,1993):

1. Pemerataan dan Keadilan (*Equity and Justice*)

Pemerataan dan keadilan berkaitan dengan sikap yang memicu adanya kesenjangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan yang miskin dengan yang kaya serta kondisi masa depan dengan generasi baru yang tak terkendali dengan kondisi generasi masa kini. Sebab itu, pemerataan dan keadilan harus dilakukan dengan baik untuk masa kini dan masa yang akan datang. Oleh karena itu strategi dan perencanaan pembangunan harus di dasari premis seperti : distribusi

penguasaan lahan, distribusi faktor produksi, pemerataan peran dan kesempatan bagi wanita, kelompok marjinal, dan lain lain.

2. Pendekatan Integratif (*Integrative Approach*).

Pentingnya keterkaitan antara manusia dengan alam dalam pembangunan berkelanjutan. Adanya manusia memberikan dampak bagi alam baik yang memberikan manfaat maupun yang merugikan. Keberlanjutan masa depan hanya dimungkinkan apabila keterkaitan antara sistem alam dan sistem sosial dapat dimengerti dengan cara integrasi yang dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan.

3. Perspektif Jangka Panjang (*Long Term Perspective*).

Visi dalam jangka pendek masih berdominasi pada pengambilan keputusan sedangkan visi pada jangka panjangnya merupakan visi dari pembangunan berkelanjutan itu sendiri.

4. Keberlanjutan Ekologis (*Ecological Sustainability*).

Keberhasilan pada eksistensi bumi dijamin oleh keberlanjutan ekologis. Dalam keberlanjutan ini dijaga dengan upaya asimilasi, peningkatan daya dukung, keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya yang dapat diperbarui (*renewable resources*).

5. Keberlanjutan Ekonomi (*Economic Sustainability*).

Membantu peningkatan ekonomi secara berkelanjutan dan membantu dalam efisiensi ekonomi. Ada tiga hal yang utama dapat membantu tercapainya keberlanjutan ekonomi makro yaitu : distribusi kemakmuran, kesejahteraan yang berkelanjutan serta efisiensi ekonomi.

6. Keberlanjutan Sosial Budaya (*Social Cultural Sustainability*).

Keberlanjutan sosial budaya disebut juga dengan harga diri manusia, keadaan sosial dan peningkatan kualitas hidup manusia. Sasaran dari keberlanjutan dari keberlanjutan sosial budaya ini adalah : pemenuhan kebutuhan manusia, mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan serta stabilisasi penduduk.

7. Keberlanjutan Politik (*Political Sustainability*).

Ciri-ciri keberlanjutan politik yaitu kepastian tersedianya pangan, air dan pemukiman, demokrasi serta adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia.

8. Keberlanjutan Ketahanan dan Keamanan (*Defense and Security Sustainability*).

Kemampuan dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, serta gangguan baik dari luar maupun dalam yang secara langsung maupun yang secara tidak langsung serta membahayakan identitas, integritas dan keberlangsungan bangsa dan Negara.

Strategi *World Commission on Environment and Development* (WCED) digunakan untuk mencapai kemungkinan keberlanjutan, secara garis besar strategi ini mempunyai tiga hal penting yaitu :

- 1) Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
- 2) Pembangunan sosial berkelanjutan, serta
- 3) Pengelolaan kualitas lingkungan berkelanjutan.

Dalam hal ini, ketiga hal penting tersebut tidak lepas dari peran penduduk sebagai pelaku utama dalam pembangunan yaitu untuk menjaga kestabilan sosial, melestarikan lingkungan hidup serta tidak lepas dari pertumbuhan

ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu Negara pada kenyataannya memiliki batas (*limit to growth*). Untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan dibutuhkan sarana yang membantu dalam menjaga hubungan antara masyarakat, sumber daya, lingkungan, serta pembangunan tetap dalam keadaan yang dinamis (Tjiptoherijanto, 2005).

2.1.2 Teori Industrialisasi

Industrialisasi merupakan salah satu cara perkembangan ekonomi yang penting untuk mempercepat kemajuan ekonomi pada suatu bangsa. Industrialisasi merupakan pergeseran struktur dari sektor ekonomi agraris (pertanian) menuju ke sektor ekonomi industri.

Menurut Simon Kuznet mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu bangsa tidak hanya ditandai dengan meningkatnya produksi perorangan, tetapi sebagian besar ditandai dengan perubahan struktur baik itu dari sosial maupun dari ekonomi. Perubahan struktur ekonomi di tandai adanya pergeseran dari sektor agraris ke sektor non agraris (industrialisasi). Disisi lain juga terjadi perubahan kedudukan ekonomi, seperti: tingkat pendapatan, status pekerjaan serta distribusi barang dan jasa.

Alan Mountjoy mengungkapkan, sektor industri mempunyai beberapa keuntungan dibandingkan produksi primer, antara lain :

1. Memiliki metode, persaingan, dan output yang lebih fleksibel dari pada sektor pertanian.
2. *Decreasing return*, keadaan dimana dalam penambahan faktor produksi dan biaya produksi diiringi dengan penurunan jumlah

produksi yang tidak menguntungkan lagi. Sehingga harus mengembangkan unit produksi yang baru. Perkembangan sektor industry manufaktur lebih lambat dari sektor pertanian dikarenakan dalam industri adanya perbaikan teknologi sehingga efisiensi dan produktifitas juga semakin tinggi.

3. kontrol produksi yang lebih tepat dalam permintaan dan penawaran. Demikian, juga dengan supply yang lebih elastis bila terjadi perubahan harga dan perubahan permintaan.
4. Proporsi antara biaya operasi dan biaya tetap yang lebih baik.
5. Perekonomian dalam sektor industri lebih banyak menyerap tenaga kerja. Karena sasaran kebijakandalam perindustrian antara lain : (a) menyediakan lapangan pekerjaan, terutama bagi tenaga kerja sektor pertanian yang jumlahnya semakin banyak dan terbatasnya kesempatan kerja. (b) memperbaiki taraf hidup (c) memperbaiki kondisi neraca pembayaran (d) meningkatkan prestise atau gengsi suatu bangsa.

Perkembangan dan pembangunan suatu industri merupakan urat nadi dari pertumbuhan ekonomi sebab, kontribusi dari sektor industri yang besar terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) juga mengalami peningkatan. Menurut Undang-Undang No.3 Tahun 2014. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku, bahan setengah jadi, atau barang jadi dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk jasa industri. Setiap Negara di dunia melakukan kegiatan industrialisasi untuk menunjang perekonomian nya (Chenery dalam Tambunan, 2001). Hal ini menunjukkan

bahwa sektor industri telah dipercaya sebagai leading sektor yang dapat membawa perekonomian menuju kemakmuran.

Dumairy (dalam Prabowo 2014) berpendapat bahwa dalam pelaksanaan industrialisasi di setiap Negara sangat berbeda beda, dalam implementasinya ada 4 teori yang digunakan oleh beberapa Negara yang mendasari industrialisasinya. Yaitu teori

1. Keunggulan Komparatif (*Comparative advantage*)

Keunggulan komparatif suatu negara yang menjadi alasan negara tersebut menganut teori tersebut dalam industrinya.

2. Keterkaitan Industri (*Industrial linkage*)

Industri yang mempunyai hubungan yang luas dengan sektor ekonomi yang lain menjadi alasan Negara tersebut menganut teori tersebut dalam industrinya.

3. Penciptaan kesempatan kerja (*employment creation*)

Penyerapan tenaga kerja yang tinggi menjadi alasan Negara tersebut menganut teori tersebut dalam industrinya.

4. Loncatan teknologi (*teknologi Jump*)

Industri yang mempunyai teknologi yang tinggi sehingga terjadi perubahan alih ekonomi bagi sektor yang lain yang menjadi alasan Negara tersebut menganut teori tersebut dalam industrinya.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) industri adalah sebuah kesatuan yang menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk menghasilkan barang atau jasa yang berdomisili pada sebuah tempat atau lokasi tertentu dan memiliki catatan administrasi sendiri (Sasrawan, 2014).

Secara umum, istilah produksi diartikan sebagai penggunaan atau pemanfaatan sumber daya yang mengubah suatu komoditi menjadi komoditi lainnya yang sama sekali berbeda (Miller dan Meiners,2000). Menurut Mansyuri (2007) produksi (output) adalah suatu aktifitas yang menghasilkan barang atau jasa dengan jalan memanfaatkan produksi (input).

Dilihat dari produksi yang dihasilkan, industri dibagi menjadi tiga jenis yaitu industri primer, industri sekunder dan, industri tersier (Sajo,2009)

- a. Industri primer merupakan industri yang memproduksi barang atau benda yang dalam pengolahan tidak berkelanjutan, akan tetapi barang atau benda yang di produksi dapat dinikmati secara langsung. Contohnya adalah industri makanan dan minuman.
- b. Industri sekunder merupakan industri yang memproduksi barang atau benda yang dalam pengolahan nya dibutuhkan pengolahan berkelanjutan sebelum dapat digunakan atau dinikmati. Contohnya adalah pemintalan benang.
- c. Industri tersier merupakan industri yang hasil dari produksinya tidak berupa barang atau benda melainkan berupa jasa layanan yang dapat mempermudah kebutuhan masyarakat. Contohnya adalah industri angkutan.

Industri pengolahan merupakan sebuah sektor yang kegiatannya mengolah atau merubah baik itu organik maupun anorganik menjadi suatu barang yang bernilai tinggi sedangkan pengolahannya dapat dilakukan dengan tangan maupun dengan alat atau mesin. Dilihat dari barang yang dihasilkan serta cara pengolahan nya dan pengelompokan industri sangat bermacam bentuk nya.

Akan tetapi, dalam hal ini, BPS mengelompokkan berdasarkan proses cara pembuatan serta banyak nya tenaga kerja yang dilibatkan di bedakan menjadi empat golongan yaitu (BPS,2011) :

- a. Industri kerajinan rumah tangga (mikro) I sampai 4 pekerja.
- b. Industri kecil dengan tenaga kerja 5 sampai 19 pekerja.
- c. Industri sedang (menengah) dengan tenaga kerja 20 hingga 99 orang pekerja.
- d. Kelompok besar dengan tenaga kerja sama dengan atau lebih dari 100 pekerja.

Pengelompokan lain dari kegiatan industri dibuat berdasarkan jenis barang yang dihasilkan oleh setiap perusahaan. Secara garis besar kegiatan industri di bedakan menjadi Sembilan subsector, yaitu (BPS 2011) :

- a. Industri makanan, minuman dan tembakau.
- b. Industri tekstil, barang dari kulit, dan alas kaki.
- c. Industri barang dari kayu dan hasil hutan lainnya.
- d. Industri kertas dan barang cetakan.
- e. Industri pupuk, barang kimia, dan barang dari karet.
- f. Industri semen dan barang galian bukan logam.
- g. Industri logam dasar besi dan baja
- h. Industri alat angkutan, mesin dan peralatannya.
- i. Industri barang lainnya.

2.1.3 Teori Eksternalitas

Eksternalitas merupakan efek samping dari suatu tindakan pelaku ekonomi terhadap pelaku ekonomi lain yang merupakan pengaruh sampingan terjadi

apabila perusahaan atau orang-orang yang membebankan biaya atau manfaat atau orang lain diluar tempat berlangsungnya pasar. Eksternalitas muncul ketika seseorang ataupun perusahaan mengambil tindakan yang mempunyai efek bagi seseorang ataupun perusahaan, efek tersebut tidak dibayar oleh individu atau perusahaan yang bertindak. Disebut eksternal karena mekanisme pasar tidak dapat memasukkan semua biaya, yaitu biaya sosial, biaya sebenarnya dari barang tersebut dalam penentuan harga barang (*true cost*). Eksternalitas dibagi menjadi dua tipe yaitu eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Eksternalitas positif terjadi apabila pengaruh sampingannya bersifat membangun. Sedangkan eksternalitas negatif akan terjadi apabila pengaruh sampingannya bersifat mengganggu dapat berupa gangguan kecil hingga ancaman besar.

Beberapa pendapat mengemukakan tentang teori eksternalitas. Rossen (1998), menyatakan bahwa terjadinya eksternalitas karena suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang memberikan dampak pada orang lain diluar mekanisme pasar. Perbedaan antara harga pasar dengan *social cost* yang dikarenakan adanya inefisien dalam alokasi sumber daya hal itu yang memicu terjadinya eksternalitas. Eksternalitas adalah efek samping dari suatu kegiatan atau tindakan oleh kelompok tertentu kepada kelompok yang lain, baik yang bersifat menguntungkan atau merugikan masyarakat (Ginting, 2011).

Reksohadiprojo (2001) mengungkapkan bahwa yang dimaksud eksternalitas adalah biaya atau manfaat transaksi pasar yang tidak tercantum dalam harga. Jika terjadi eksternalitas maka akan ada pihak ketiga yang akan menerima dampak dari produksi dan konsumsi. Terjadinya eksternalitas dikarenakan ada sesuatu hal yang menyertainya, yaitu :

- a. Adanya pengaruh dari suatu tindakan
- b. Tidak adanya kompensasi yang harus diterima ataupun dibayar.

Aziz, (2010) mengungkapkan bahwa eksternalitas merupakan suatu kejadian dari tindakan pelaku ekonomi yang berdampak pada utilitas atau fungsi produksi pelaku ekonomi lainnya, tanpa adanya campur tangan dari pihak lain dalam pengambilan keputusan dalam tindakan tersebut. serta tidak adanya kompensasi yang dibayardari pihak yang menyebabkan terjadinya dampak.

2.1.3.1 Manfaat Eksternalitas Bagi Masyarakat (*benefit to society*)

Eksternalitas bagi masyarakat dapat berupa manfaat (*benefit to society*) maupun beban atau biaya (*cost on society*) dikarenakan adanya aktivitas produksidan konsumsi. Manfaat maupu beban ini tidak hanya dirasakan oleh orang yang berkepentingan langsung dengan perusahaan tersebut seperti pemilik, konsumen, pekerja, pemerintah, atau masyarakat yag berhubungan langsung dengan perusahaan tersebut, namun juga dirasakan oleh masyarakat lain yang tidak ada hubungannya langsung dengan aktifitas dan keberadaan perusahaan tersebut.

Limpahan (*spill over*) dari manfaat atau beban kemasyarakatan yang berkepentingan dengan aktifitas tersebut dinamakan eksternalitas, atau dampak keberadaan suatu aktifitas produksi maupun konsumsi pada masyarakat luas yang tidak berhubungan atau punya kepentingan langsung dengan aktifitas tersebut.

Manfaat bagi masyarakat yang dihasilkan oleh aktifitas produksi pihak lain yaitu :

1. Mendorong timbulnya inovasi dimasyarakat

2. Penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat
3. Pengalokasian sumber daya lebih efisien
4. Pengembangan sumber daya manusia
5. Penelitian dan pengembangan di sektor industri

Walaupun aktifitas produksi menimbulkan manfaat bagi masyarakat yang biasanya dapat diukur dengan hitungan nilai tambah namun manfaat yang timbul karena aktifitas produksi pihak lain ini akan menyebabkan hilangnya sebagian potensi kesejahteraan yang dapat dinikmati masyarakat.

- Mendorong timbulnya keinginan di masyarakat
- Mendorong timbulnya inovasi di masyarakat
- Penciptaan pilihan baru bagi masyarakat
- Perawatan kesehatan (preventif-vaksinasi)
- Transportasi umum
- Taman yang indah dan menarik

Walaupun aktifitas konsumsi menimbulkan kepuasan bagi konsumen, dan merupakan pemicu aktifitas produksi, namun manfaat yang timbul karena konsumsi pihak lain ini juga akan memicu hilangnya sebagian potensi kesejahteraan yang dapat diraih oleh masyarakat.

2.1.3.2 Beban atau Biaya Bagi masyarakat (Cost on Society)

- a. Beban bagi masyarakat dari kegiatan produksi pihak lain
 - Polusi yang dapat merusak kualitas dan kenyamanan lingkungan hidup
 - Kemacetan
 - Pedagang di trotoar

- Perusak pagar tamanan dan satwa liar
- Kejahatan
- Krisis ekonomi

Walaupun aktifitas produksi menimbulkan manfaat bagi masyarakat berupa nilai tambah, namun beban masyarakat yang timbul karena aktifitas produksi pihak lain ini menyebabkan hilangnya sebagian potensi kesejahteraan (*The Loss of Publik Welfare*) yang dapat dinikmati masyarakat

b. Beban bagi masyarakat dari kegiatan konsumsi pihak lain

- Mengganggu kenyamanan
- Mengganggu kelancaran
- Meningkatkan biaya hidup masyarakat
- Sampah

Walaupun aktifitas konsumsi menimbulkan kepuasan bagi konsumen, dan merupakan pemicu aktifitas produksi, namun beban bagi masyarakat yang timbul karena aktifitas konsumsi pihak lain ini juga akan memicu hilangnya sebagian potensi kesejahteraan yang dapat diraih masyarakat.

2.1.3.3 Jenis-jenis Eksternalitas

a. Eksternalitas Positif

Eksternalitas positif adalah tindakan suatu pihak yang memberikan manfaat bagi pihak lain, tetapi manfaat tersebut tidak dialokasikan di dalam pasar. Jika kegiatan dari beberapa pihak menghasilkan manfaat bagi pihak lain dan pihak yang menerima manfaat tersebut tidak memberikan tidak membayar atau

memberikan harga atas manfaat tersebut maka nilai sebenarnya dari kegiatan tersebut tidak tercermin dalam kegiatan pasar

b. Eksternalitas Negatif

Eksternalitas negative adalah biaya yang dikenakan pada oranglain diluar sistem pasar sebagai produk dari kegiatan produktif. Contoh dari eksternalitas negatif adalah pencemaran lingkungan. Misalnya di daerah industri, pabrik sering mencemari udara dan orang-orang sekitar harus menderita konsekuensi negatif dari udara yang tercemar meskipun mereka tidak ada hubungannya dengan memproduksi polusi. Dampak dari eksternalitas positif dan negative masing-masing juga dapat menjadi dua kegiatan ekonomi yaitu produksi dan konsumsi, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Eksternalitas positif dari produksi

Merupakan dampak yang menguntungkan dari suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak terhadap pihak yang lain tanpa adanya kompensasi dari pihak yang diuntungkan. Meskipun banyak pasar dimana biaya sosial melebihi biaya pribadi, ada pula pasar-pasar yang justru sebaliknya, yakni biaya pribadi para produsen lebih besar dari biaya sosialnya. Di pasar inilah, eksternalitas bersifat positif, dalam arti menguntungkan pihak lain.

2. Eksternalitas negative dari produksi

Pengertian eksternalitas negatif lebih kurang adalah efek samping yang negative dari suatu tindakan dari perilaku ekonomi yang diderita oleh pihak yang tidak terlihat dalam tindakan ekonomi tersebut. Misalnya jika industri pemotongan kapal menghasilkan polusi. Perusahaan tersebut dalam kegiatan tidak akan

memperhitungkan biaya yang harus dikeluarkan dalam kegiatannya tidak akan memperhitungkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak luar maupun keuntungan yang didapat dari pihak luar.

3. Eksternalitas positif dalam konsumsi

Eksternalitas dalam konsumsi ini juga ada yang bersifat positif. Contohnya adalah konsumsi pendidikan. Semakin banyak orang yang terdidik, masyarakat atau pemerintahnya akan diuntungkan. Pemerintah akan lebih mudah merekrut tenaga tenaga cakap, sehingga pemerintah lebih mampu menjalankan fungsinya dalam melayani masyarakat.

4. Eksternalitas negatif dalam konsumsi

Merupakan konsumsi barang yang mengakibatkan kerugian yang harus ditanggung oleh pihak lain. Konsumsi minuman beralkohol, misalnya mengandung eksternalitas negative jika sipeminum lantas mengemudikan mobil dalam keadaan mabuk atau setengah mabuk, sehingga membahayakan pemakaian jalan lainnya.

Efisiensi alokasi sumber daya dan distribusi konsumsi dalam ekonomi pasar dengan kompetensi bebas dan sempurna bisa terganggu, jika aktivitas dan tindakan individu pelaku ekonomi baik produsen maupun konsumen mempunyai dampak baik terhadap mereka sendiri maupun terhadap pihak lain. Eksternalitas itu dapat terjadi dari empat interaksi ekonomi berikut ini :

- 1) Efek atau dampak satu produsen terhadap produsen lain
- 2) Efek atau dampak samping kegiatan produksi terhadap konsumen
- 3) Efek atau dampak dari suatu konsumen terhadap konsumen lain.

- 4) Efek akan dampak dari suatu konsumen terhadap produsen.

2.1.3.4 Faktor-Faktor Eksternalitas

Eksternalitas timbul pada dasarnya karena aktifitas manusia yang tidak mengikuti prinsip-prinsip ekonomi yang berwawasan lingkungan. Dalam pandangan ekonomi, eksternalitas dan ketidakefisienan timbul karena salah satu atau lebih dari prinsip-prinsip sumber daya yang efisien tidak terpenuhi. Karakteristik sumber daya atau sumber daya publik, ketidak sempurnaan pasar, kegagalan pemerintah merupakan keadaan-keadaan dimana unsur kepemilikan atau penguasaan sumber daya (*property rights*) tidak terpenuhi. Sejauh semua faktor ini tidak ditangani dengan baik, maka eksternalitas dan ketidakefisienan ini tidak bisa dihindari.

a. Keberadaan barang publik

Barang publik yang berkaitan dengan lingkungan meliputi udara segar, pemandangan yang indah, rekreasi, air bersih, hidup yang nyaman dan sejenisnya. Satu-satunya mekanisme yang membedakannya adalah dengan menetapkan harga (nilai moneter) terhadap barang publik tersebut sehingga menjadi barang privat (dagang) sehingga benefit yang diperoleh dari harga itu bisa dipakai untuk mengendalikan atau memperbaiki kualitas lingkungan itu sendiri. Tetapi dalam menetapkan harga ini menjadi masalah tersendiri dalam analisa ekonomi lingkungan. Karena memiliki sifat *non-excludable* dan *non-rivalry* barang public yang tidak diperjualbelikan. Sehingga tidak memiliki harga, barang publik dimanfaatkan berlebihan dan tidak mempunyai intensif untuk melestarikannya. Masyarakat atau konsumen cenderung acuh tak acuh untuk menentukan harga sesungguhnya dari barang public ini. Hal ini mendorong

sebagian masyarakat sebagai *free rider*. Keadaan seperti itu akhirnya mengakibatkan kurangnya insentif atau rangsangan untuk memberikan kontribusi terhadap penyediaan dan pengelolaan barang publik. Kalaupun ada kontribusi, maka sumbangan itu tidaklah cukup besar untuk membiayai penyediaan barang publik yang efisien, karena masyarakat cenderung memberikan nilai yang lebih rendah dari yang seharusnya (*undervalued*).

b. Sumber daya bersama

Keberadaan sumber daya bersama (*Common Resources*) atau akses terbuka terhadap sumber daya tertentu ini tidak jauh berbeda dengan keberadaan barang publik. Sumber-sumber daya milik bersama, sama halnya dengan barang-barang publik, tidak ekskludabel. Sumber-sumber daya ini terbuka bagi siapa saja yang ingin memanfaatkannya, dan cuma-cuma. Namun tidak seperti barang publik, sumber daya milik bersama memiliki sifat persaingan. Pemanfaatannya oleh, seseorang, akan mengurangi peluang bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi, keberadaan sumber daya milik bersama ini, pemerintahan juga perlu mempertimbangkan seberapa banyak pemanfaatannya yang efisien.

c. Ketidakefisienan Pasar

Masalah lingkungan bisa juga terjadi ketika salah satu partisipan di dalam suatu tukar menukar hak-hak kepemilikan (*property rights*) mampu mempengaruhi hasil yang terjadi (*outcome*). Hal ini bisa terjadi pada pasar yang tidak sempurna (*imperfect market*) seperti pada kasus monopoli. Ketidakefisienan pasar ini misalnya terjadi pada praktek monopoli dan kartel. Contoh konkret dari praktek ini adalah organisasi Negara-negara pengekspor

minyak (OPEC) dalam memproduksi minyak dalam jumlah yang lebih sedikit mengakibatkan meningkatnya harga yang lebih tinggi dari harga normal. Pada kondisi yang demikian akan hanya berakibat terjadi peningkatan surplus produsen yang nilainya jauh lebih kecil dari kehilangan surplus konsumen, sehingga secara keseluruhan praktek monopoli ini merugikan masyarakat (*worse off*).

d. Kegagalan Pemerintah

Sumber ketidakefisienan dan atau eksternalitas tidak sengaja diakibatkan oleh kegagalan pasar tetapi juga karna kegagalan pemerintah (*government failure*). Kegagalan pemerintah banyak diakibatkan tarikan kepentingan pemerintah sendiri atau kelompok tertentu (*interest group*) yang tidak efisiensi. Kelompok tertentu ini memanfaatkan pemerintah untuk mencari keuntungan (*rent seeking*) melalui proses politik, melalui kebijaksanaan dan sebagainya.

2.1.3.5 Solusi dan Kebijakan dalam Mengatasi Eksternalitas

Dalam prakteknya, bukan hanya pemerintah saja yang perlu dan dapat mengatasi eksternalitas, melainkan juga pihak-pihak non pemerintah, baik itu pribadi/kelompok maupun pengusaha/organisasi kemasyarakatan. Pada dasarnya, tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah maupun pihak swasta (perorangan atau kelompok), berkenaan dengan penggunaan eksternalitas itu adalah mendorong alokasi sumber daya agar mendekati kondisi optimum secara sosial. Upaya-upaya yang dilakukan pihak swasta (*privat solutions*) dalam mengatasi persoalan eksternalitas, antara lain salah satunya melalui konsep CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang dimaksud sebagai upaya

perusahaan untuk meningkatkan kepedulian terhadap masalah sosial dan lingkungan.

Teorema Coase

Pakar ekonom, Ronald Coase menyampaikan pemberian hak milik yang tepat terhadap suatu barang, walaupun tetap akan ada eksternalitas tetapi tetap bisa menimbulkan tawar-menawar antara pihak-pihak yang terkait sehingga pihak-pihak yang terkait bisa bersama-sama mencari solusi yang terbaik ini dengan teorema Coase.

Menurut teorema Coase (Coase theorem), mengungkapkan masyarakat yang ideal dengan sektor swasta bisa mengatasi sendiri masalah eksternalitas yang ada tanpa bantuan dari pihak lain. Pandangan lain datang dari Ronald Coase tidak lain yang merumuskan teorema Coase, pihak-pihak yang terlibat dan berkepentingan (yaitu pihak yang menghasilkan atau memberikan eksternalitas kepada pihak yang diuntungkan atau yang dirugikan) dapat melakukan negosiasi dan perundingan untuk penanganan eksternalitas yang terjadi, tanpa adanya biaya khusus yang memberatkan alokasi sumber daya yang telah ada. Jadi adanya eksternalitas tidak selalu membuat sumberdaya tidak efisien. Dari pandangan tersebut, dapat diartikan teorema Coase bergantung pada asumsi bahwa biaya tawar-menawar yang terjadi pihak yang memproduksi eksternalitas dan pihak yang merasakan eksternalitas adalah nol. Apabila biaya dalam kegiatan tawar-menawar tinggi, maka dalam sistem pertukaran sukarela dapat dikatakan tidak mencapai hasil yang efisien.

Meskipun secara teoritis teorema Coase sangat baik, tetapi dalam mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sangat sulit. Hal ini dikarenakan

tingginya biaya tawar menawar yang berkaitan dengan eksternalitas lingkungan. Sulitnya dalam menggolongkan pihak-pihak yang dirugikan pada satu unit bagian yang efektif serta dalam menghitung biaya moneter dari setiap kerugian pihak yang merasakan dampaknya. Dari kegagalan teorema Coase tersebut membuat pemerintah harus campur tangan. Dalam hal ini ada empat tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah eksternalitas yaitu:

1. Menetapkan baku lingkungan (*environmental Standards*),
2. Memberlakukan pajak polusi (*pollution taxes*),
3. Memberikan ijin berpolusi yang dapat diperjualbelikan (*tradable emissions permits*), dan
4. Memberikan pajak atau subsidi bagi perusahaan yang menghasilkan eksternalitas. Pajak atau subsidi yang diberlakukan adalah pajak yang dikembangkan oleh Pigou yang disebut dengan *Pigouvian taxes*.

Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah/Kota

Penyusunan kebijakan rencana tata ruang wilayah/kota merupakan bentuk intervensi pemerintah guna meminimalkan eksternalitas negatif akibat pemanfaatan ruang perkotaan yang berlebihan. Pemerintah berasumsi bahwa apabila kebijakan tata ruang dipatuhi, maka dapat meminimalkan eksternalitas negatif seperti banjir, kemacetan, dll. Dengan demikian rencana tata ruang seharusnya dianggap sebagai *public goods* yang dibutuhkan oleh semua warga dalam rangka meminimalisir eksternalitas negatif akibat transaksi pemanfaatan ruang wilayah/perkotaan oleh berbagai pihak. Sebagai *public goods*, kebijakan penataan ruang wilayah/kota seharusnya memiliki sifat *non-excludable* dan non

rivalry dalam arti semua warga seharusnya dapat secara bebas mengakses rencana tata ruang tersebut.

Aksesibilitas terhadap *public goods* ini menjadi penting karena masyarakat harus memahami bahwa development right yang dimilikinya dibatasi oleh kebijakan tata ruang. Masyarakat harus menyadari bahwa pembatasan ini bertujuan menjamin bahwa pemanfaatan development right oleh seseorang tidak memberikan eksternalitas secara berlebihan kepada warga yang lain. Contohnya pemerintah mengeluarkan peraturan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Tata Ruang yang menjadi sangat penting karena setiap rencana pembangunan perkotaan harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Kota. Apabila suatu rencana pembangunan baik yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, swasta, maupun masyarakat tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota, maka rencana pembangunan tersebut tidak boleh dilaksanakan. Hal ini mengandung makna bahwa setiap pemanfaatan ruang harus sesuai dengan peruntukan yang telah diterapkan dalam Rencana Tata Ruang Kota. Hal ini bagus dalam rangka mengendalikan pertumbuhan kota sekaligus membatasi eksternalitas negatif pemanfaatan ruang kota secara berlebihan.

Regulasi

Regulasi adalah tindakan mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan. Dengan regulasi pemerintah dapat melarang atau mewajibkan perilaku atau tindakan, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh untuk dilakukan pihak-pihak tertentu dalam rangka mengatasi eksternalitas. Dengan adanya regulasi memaksa penghasil polusi untuk mengurangi polusi yang dihasilkan industri karena polusi tersebut merupakan

tanggung jawab pihak yang menghasilkan polusi dan diberlakukannya sanksi yang tegas bagi pelaku yang melanggar regulasi. Contohnya pemerintah mengeluarkan PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Tetapi dalam kenyataannya regulasi ini sulit diterapkan karena pada kenyataannya masalah polusi yang terjadi tidaklah selalu sederhana. Karena polusi merupakan efek samping yang tak terelakkan dari kegiatan produksi industri. Kita tidak dapat menghapus polusi secara total. Kita hanya bisa menabati jumlah polusi hingga ambang tertentu. Sehingga tidak akan terlalu merusak lingkungan namun tidak juga menghalangi kegiatan produksi.

Pajak Pigouvian

Merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi eksternalitas. Konsumen maupun perusahaan yang menyebabkan eksternalitas harus membayar pajak sama dengan dampak marginal dari eksternalitas yang dibuat. Hal itu membuat konsumen atau perusahaan memperhitungkan berapa banyak manfaat dan dampak dari jumlah barang yang di produksi atau konsumsi perusahaan atau konsumen. Artinya dengan diterapkannya pajak akan memberikan insentif kepada para pemilik pabrik untuk mengurangi sebanyak banyaknya polusinya. Semakin tinggi tingkat pajak yang dikenakan maka semakin banyak penurunan polusi yang terjadi. Pemerintah harus campur tangan untuk mengatasi eksternalitas negatif.

Subsidi

Ketika manfaat sosial melebihi manfaat pribadi maka subsidi harus diberikan kepada konsumen atau produsen. Subsidi mengarah pada penurunan dalam harga komoditi. Pemerintah dapat mensubsidi produsen untuk mengurangi

dampak eksternalitas. Keuntungan produsen didapat dari subsidi pemerintah dan keuntungan masyarakat dalam hal pengurangan kerusakan dari dampak eksternalitas yang ditimbulkan perusahaan. Kelemahan dari subsidi adalah perusahaan perusahaan condong untuk melakukan eksternalitas karena dengan melakukan eksternalitas mereka akan mendapat subsidi dari pemerintah.

2.1.4 Internalisasi

Dalam mengontrol eksternalitas pertama kali dibahas oleh David dan Whinston. David dan Whinston menganjurkan internalisasi untuk mengatasi eksternalitas sehingga biaya privat sama dengan biaya sosialnya. Inti dari internalisasi adalah misalnya jika ada perusahaan A menyebabkan eksternalitas negatif hanya kepada perusahaan B maka perusahaan A dan perusahaan B bersama sama menghitung dampak dari eksternalitas. Dengan ini, efisiensi tidak akan muncul. Melakukan internalisasi merupakan hal yang sulit. Ambil saja contoh suatu industri suatu perusahaan menyebabkan eksternalitas bagi industri perusahaan lain. Dalam situasi ini internalisasi menyarankan perusahaan menjadi monopoli tunggal. Jika hal ini terjadi maka akan menyebabkan kesejahteraan menjadi kurang atau mungkin hilang. Internalisasi biasanya secara tidak langsung membangun agen ekonomi yang lebih besar dan konsekuensi bertambahnya kekuatan pasar. Singkatnya internalisasi akan menghilangkan konsekuensi dari eksternalitas dengan cara memastikan bahwa biaya pribadi dengan biaya sosial disamakan. Masalah internalisasi bukanlah solusi yang praktis ketika kontribusi agen ekonomi secara terpisah kedalam eksternalitas total dan memiliki kelemahan yang mengarah kekuatan pasar meningkat.

2.1.4.1 Internalisasi biaya eksternal

Eksternalitas sangat erat hubungannya dengan efisiensi alokasi sumberdaya. Sumberdaya dapat dialokasikan dengan berbagai pengaturan kelembagaan seperti kediktatoran (*dictatorship*), perencanaan terpusat (*central planning*), ataupun melalui mekanisme pasar bebas (*free market*). Teori ekonomi standar mengatakan bahwa selain pasar bebas dalam pengaturan kelembagaan bisa saja mengalokasikan sumber daya secara efisien, namun hanya *free market* yang mengalokasikan sumberdaya secara optimal dan efisien. Dengan kata lain jika pasar bebas tidak terjadi maka alokasi sumberdaya tidak akan optimal dan efisien (Fauzi 2004).

Sumberdaya alam dalam beberapa hal tidak ditransaksikan dalam mekanisme pasar atau mekanisme pasar tidak berjalan sempurna. Dalam hal ini contohnya barang lingkungan seperti kualitas air sungai yang merupakan barang yang tidak memiliki harga pasar sehingga sulit melakukan penilaian (Fauzi, 2004). Pemanfaatan air sungai yang dilakukan secara berlebihan dapat menyebabkan dampak negatif bagi pengguna lainnya. Sehingga pengguna lain harus mengeluarkan biaya eksternal karena telah memanfaatkan air sungai yang tercemar.

Menurut Fauzi (2010), dalam pasar bebas tidak mengenal adanya eksternalitas. Segala bentuk transaksi dalam hal ini permintaan dan penawaran berjalan sempurna. Artinya pasar dapat memenuhi permintaan yang ada. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan barang lingkungan seperti kualitas air, permintaan akan air yang bersih, dalam hal ini pasar tidak berjalan atau dapat

dikatakan telah terjadi kegagalan pasar (*market failure*). *market failure* yang disebabkan oleh kegagalan pasar dapat dikurangi dengan kebijakan diantaranya:

- 1) Pengaturan *property right* dengan cara pemerintah memberikan hak tersebut kepada suatu pihak yang menggunakan barang publik,
- 2) Internalisasi biaya eksternal,
- 3) Distribusi *right*,
- 4) Optimalisasi produksi dan konsumsi,
- 5) Aturan intensif dan kompensasi,
- 6) Penilaian lingkungan,
- 7) Penyusunan neraca sumberdaya alam,
- 8) Penetapan otoritas sumberdaya alam.

Mengacu pada kebijakan yang telah diuraikan diatas, salah satu yang dapat dilakukan untuk mengatasi eksternalitas yang menyebabkan penurunan kualitas lingkungan yaitu dengan melakukan internalisasi biaya eksternal. Internalisasi biaya eksternal adalah upaya untuk menginternalkan dampak yang ditimbulkan dengan cara menyatukan proses pengambilan keputusan dalam satu unit usaha (Fauzi, 2010).

Dampak dari adanya kegagalan pasar mempengaruhi *demand* akan barang mentah, tenaga kerja, dan lain-lain. Pada akhirnya dirasakan oleh seluruh ekonomi. Kelemahan utama dalam mengatasi masalah eksternalitas yaitu adanya kesempatan berlakunya pertukaran pasar merupakan persepsi mengenai pihak-pihak yang terlibat dan hanya ada dua pihak yang terlibat. Dan sebenarnya pencemaran tersebut diciptakan oleh produsen dan konsumen dalam jumlah yang banyak. Pihak-pihak yang menimbulkan pencemaran tersebut tidak dapat

dipisah atau digolongkan secara pasti, demikian juga dengan pihak yang menerima pencemaran tersebut tidak dapat disebutkan secara pasti. Dengan keadaan tersebut, maka penyelesaian masalah ini sulit dilakukan, dan cara ini bisa dilakukan hanya dengan dua pihak saja yang terlibat.

Internalisasi biaya eksternal memberi kesempatan berlakunya pertukaran atas pencemaran yang melalui pasar sangat sulit untuk dilakukan dalam prakteknya. Cara yang lain dalam menginternalisasikan yaitu adanya campur tangan pemerintah. Semisal sungai yang diceritakan diatas adalah milik pemerintah dan tidak dapat di pindah tangankan kepada pihak swasta. Maka tindakan pemerintah dalam menjaga sungai yaitu menetapkan pajak kepada pihak yang mencemari sungai. Dengan hal ini produsen bertanggung jawab atas biaya eksternal yang dikeluarkan oleh masyarakat.

2.1.4.1.1 Internalisasi Biaya Eksternalitas Negatif

Biaya sosial total (*total social costs*) ini mempunyai nilai maksimum sehingga dalam mencapai nilai tersebut maka jumlah barang pasar harus diturunkan. Internalisasi biaya eksternal negatif meghasilkan kurva penawaran baru, artinya jumlah barang yang sedikit dan harga satuan yang lebih tinggi. Dengan kesetimbangan ini surplus untuk produsen maupun konsumen berkurang. Internalisasi hanya mengurangi biaya sosial sampai pada tingkat tertentu sesuai dengan peraturan pemerintah atau sesuai dengan peraturan internasional yang telah disetujui oleh pemerintah bukan untuk menghapus semua biaya sosial. Dengan hal ini, yang tidak lain intervensi dari pemerintah, pihak produsen dapat diuntungkan karena mendapatkan harga barang yang tinggi di pasaran. Pigou mengusulkan kepada pihak produsen untuk memberlakukan pajak sebesar harga

persatuan barang. Penetapan besaran pajak yang ditanggung secara teori harus sama besar dengan biaya eksternal yang disebabkan oleh setiap unit zat pencemar yang telah dihasilkan. Dengan anggapan pemerintah dalam menentukan tinggi rendahnya pajak pencemaran maka, perlunya analisis bagaimana pengaruh pajak tersebut terhadap produsen yang bersangkutan. Dengan berlakunya pajak tidak berarti pencemaran akan hilang. Dalam hal ini untuk menghilangkan pencemaran maka harus tinggi pula pajak yang dikenakan hal tersebut dapat menyebabkan keputusan untuk menutup perusahaannya dari pada harus melanjutkan untuk memproduksi.

Pajak pigovian seperti yang telah dijabarkan diatas bahwa eksternalitas pada lingkungan telah diinternalisasikan langsung dan secara efektif dialokasikan. Dengan demikian harga menjadi *full cost* dan dengan tepat memasukkan seluruh biaya yang diperlukan untuk mendapatkan barang tersebut. termasuk dalam mencerminkan penurunan kesejahteraan sosial (*social welfare*) yang disebabkan oleh eksternalitas lingkungan yang menyertainya. Penyesuaian harga pasar menjadi harga *full costs* dapat tercapai dengan memberlakukan pajak yang besarnya sama dengan efek yang mempengaruhi kesejahteraan sosial. Pajak Pigovian dalam penerapannya sangat sulit dilakukan jika tujuannya untuk menentukan besar pajak yang tepat. Disebabkan sulitnya menghitung dengan tepat pajak Pigovian untuk eksternalitas lingkungan, banyak pajak aktual yang telah diterapkan namun tidak tepat Pigouvian. Meskipun demikian pemberlakuan pajak untuk masalah eksternalitas negatif pada lingkungan mempunyai kelebihan karena setiap tingkat tertentu adalah *self-policing*. Pada pihak perusahaan dapat menentukan pilihan pada tingkat berapa barang diproduksi sejauh perusahaan tersebut dapat memenuhi pajak sesuai

dengan apa yang telah menyertainya. Pajak merupakan salah satu pendapatan bagi pemerintah. Dengan adanya masalah dapat menjadi monitoring bahwa pajak telah dipungut dengan tepat dan benar.

2.1.4.1.2 Internalisasi Biaya Eksternalitas Positif

Kehadiran eksternalitas positif ini mengakibatkan jumlah barang pasar sedikit dengan harga yang rendah juga. Untuk itu, diciptakan kurva permintaan baru, sehingga diperoleh titik seimbang pasar baru. Untuk memicu pihak produsen menaikkan jumlah produksi, pemerintah memberikan subsidi sesuai dengan skema Pigou. Pemberian subsidi Pigou dapat menjadi alternatif bagi penanganan masalah eksternalitas. Seperti yang telah dicontohkan diatas, subsidi dapat mendorong produksi barang dan harga dengan surplus konsumen dan produsen yang juga naik. Tetapi untuk mendapatkan efek yang diinginkan (yaitu mengalokasikan sumber daya secara lebih tepat), subsidi Pigovian harus lebih ditekankan pada penggunaan teknik dan bukannya pada jumlah komoditi barang yang dihasilkan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

NO	Judul dan Penulis	Tujuan dan Metode Penelitian	Hasil	Perbedaan dan Persamaan
1	Judul Dampak Eksternalitas Peternakan Kambing Perah Terhadap Kehidupan Masyarakat Sekitar Penulis : L. Cyrilla, Salundik dan H. Muhasibi Tahun 2016	Tujuan Untuk menganalisis dampak eksternalitas dampak eksternalitas dari peternakan kambing perah tersebut. Metode Penelitian: Deskriptif, Kualitatif	Eksternalitas positif yang masyarakat rasakan seperti pemanfaatan limbah dari peternakan kambing tersebut, perbaikan aksesibilitas, perubahan cara pandang masyarakat tentang susu kambing dan adanya peningkatan masyarakat untuk mengonsumsi susu kambing. Bukan hanya eksternalitas positif namun juga eksternalitas negatif yang dirasakan masyarakat yaitu perubahan kualitas air, udara, serta kebersihan lingkungan.	Persamaan : - Membahas tentang Eksternalitas Perbedaan : - Objek penelitian - Tujuan penelitian - Lokasi penelitian - Metode penelitian

2	Judul Eksternalitas Kegiatan Industri Terhadap Kinerja Jalan (studi Kasus Jalan Sadang-Batas Purwakarta/Subang) Penulis : Edi Sukandar, Holi Bina Wijaya Tahun 2015	Tujuan Dalam penelitian ini penulis akan menunjukkan bagaimana biaya eksternal diperlukan sebagai salah satu pertimbangan dalam melakukan kegiatan industri pada pencemaran lingkungan Metode Penelitian : Kualitatif	Kegiatan industri di sepanjang jalan Sadang-batas Purwokarta/subang telah meningkatkan perekonomian wilayah namun juga menimbulkan eksternalitas negative seperti penurunan kinerja jalan.	Persamaan : - Membahas tentang Eksternalitas Perbedaan : - Objek penelitian - Tujuan penelitian - Lokasi penelitian - Metode penelitian
3	Judul Kajian Eksternalitas Industri Pengasapan Ikan di Kelurahan Bandarharjo	Tujuan Untuk menganalisis dampak eksternalitas perternakan kambing perah dalam kehidupan masyarakat	Dalam industri pengasapan ikan ini sering ditemukan masalah masalah yang merugikan masyarakat.seperti halnya asap yang digunakan dalam pengasapan ikan tersebut, hal itu	Persamaan : - Membahas tentang Eksternalitas Perbedaan :

	Kecamatan Semarang Utara Penulis : Aulia Dzaki, Agung Sugiri Tahun 2015	Metode Penelitian : Kualitatif, kuantitatif	menyebabkan masyarakat sangat terganggu dan akan mengeluarkan biaya eksternal dalam memenuhi kebutuhannya sebagai dampak negative.	- Objek penelitian - Tujuan penelitian - Lokasi penelitian - Metode penelitian
4	Judul Dampak Eksternalitas Positif PT. Petrokimia Gresik terhadap Masyarakat dalam Perspektif Maqashid Penulis : Elfira Riski	Tujuan Untuk menunjukkan bahwa keberadaan Petrokimia Gresik Ltd memiliki dampak eksternalitas positif pada kehidupan masyarakat sekitar seperti pendapatan, pembangunan insfrastruktur, lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian : Deskriptif, kualitatif	Dalam kegiatan industri yang dilakukan oleh PT.Petrokimia Gresik memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat seperti meningkat nya pendapatan, juga peningkatan pendidikan formal anak ke jenjang yang lebih tinggi dan memberikan kesejahteraan pada masyarakat sekitar	Persamaan : - Membahas tentang Eksternalitas Perbedaan : - Objek penelitian - Tujuan penelitian - Lokasi [enelitian - Metode penelitian

	Rahmadhani, Tahun 2016			
5	Judul Eksternalitas Produk CPO Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Perspektif Ekonomi Islam Penulis : Mariyana Tahun 2017	Tujuan Untuk menjelaskan dimensi eksternalitas, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Metode penelitian Analisis Kualitatif	Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, eksternalitas negative dari keberadaan pengelolaan CPO PT Kalirejo memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat sekitarnya. Penanganan eksternalitas negatif kurang diperhatikan oleh PT Kalirejo Lestari. Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa selain eksternalitas negatif, eksternalitas positif juga dihasilkan oleh keberadaan pengolahan CPO PT Kalirejo	Persamaan : - Membahas tentang Eksternalitas Perbedaan : - Objek penelitian - Tujuan penelitian - Lokasi penelitian - Metode penelitian
6	Judul Analisis Nilai Tambah Serbuk Gergaji dan Internalisasi Eksternalitas	Tujuan (a) Mendeskripsikan karakteristik usaha tani jamur tiram dan karakteristik usaha pengelolaan limbah	Secara umum unit usaha jamur tiram di Desa Kopo membuang limbah log tanpa diolah terlebih dahulu sehingga diperlukan campur tangan dari pemerintah setempat untuk	Persamaan : - Membahas tentang Eksternalitas Perbedaan :

	Pengolahan Limbah BAG LOG Jamur Tiram (di Kelompok Tani Cijulang Asri, Kecamatan Cisarua, Kab. Bogor)	bag log jamur menjadi pupuk kompos yang dikaji dari aspek proses produksi, sumber modal, jumlah tenaga kerja, sumber bahan baku, skala usaha, dan rantai pemasaran. (b) mengestimasi nilai tambah serbuk gergaji menjadi bag log. (c) menghitung biaya eksternal yang telah diinternalisasi dengan adanya pembuatan pupuk kompos dari olahan limbah bag log jamur. Biaya eksternal dilakukan dengan mengestimasi kesediaan masyarakat sekitar untuk menerima biaya kompensasi.	melakukan penyuluhan agar limbah log jamur tersebut diolah. Campur tangan pemerintah dapat berupa insentif dan melakukan program pengolahan limbah secara komunal agar lebih memudahkan dalam hal pengawasan.	- Objek penelitian - Tujuan penelitian - Lokasi penelitian - Metode penelitian
--	--	---	--	---

	Penulis : Stevan Gnessanda hage Tahun 2013	Metode Penelitian : kuantitatif dan kualitatif		
7	Internalisasi Biaya Eksternal Serta Analisis Kebijakan Pengembangan Energi Panas Bumi Sebagai Energi Alternatif Penulis : Bahroin Idris Tampubolon, Akhmad Fausi, Meti Ekayani Tahun 2015	Tujuan : Tujuan yang ingin dicapai dengan menginternalisasikan biaya tersebut adalah tercapainya tingkat output yang efisien secara sosial. Metode Penelitian : Kualitatif, kuantitatif	Hasil perhitungan untuk analisis kebijakan yang dilakukan menghasilkan kesimpulan pembangkit yang memiliki nilai tertinggi untuk memenuhi kriteria ekonomi, sosial, dan lingkungan adalah jenis pembangkit listrik tenaga panas bumi. Panas bumi memiliki keunggulan dari sisi ketersediaan bahan baku, penyerapan tenaga kerja, dan rendahnya tingkat emisi per output listrik yang dihasilkan jika dibandingkan dengan pembangkit listrik yang lainnya.	Persamaan : - Membahas tentang Eksternalitas Perbedaan : - Objek penelitian - Tujuan penelitian - Lokasi penelitian Metode penelitian

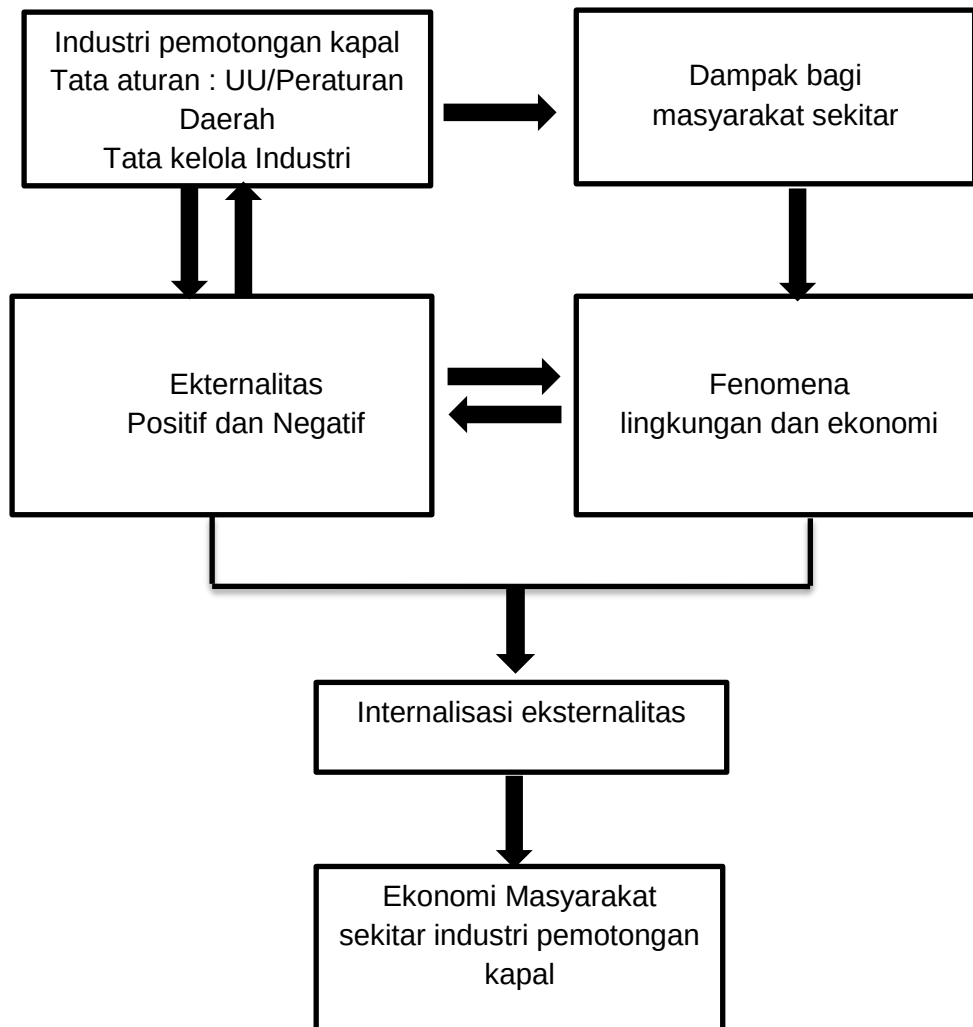
8	Internalisasi Biaya Eksternal pada Angkutan Laut BBM Domestik Penulis : Ni Putu Intan Lestari, Firmanto Hadi Tahun 2013	Tujuan : Menganalisis seberapa besar biaya eksternal yang timbul akibat proses pengangkut BBM domestic lewat laut dan dampaknya pada unit biaya transportasi.	Internalisasi biaya eksternal digunakan untuk mengetahui signifikansi biaya eksternal tersebut terhadap unit biaya angkutan laut BBM domestic, mengingat beberapa jenis BBM masih disubsidi. Analisis sensitivitas juga dilakukan untuk masing masing komponen biaya eksternal untuk mengetahui efek dari biaya tersebut terhadap unit biaya transportasi. Internalisasi ini akan menyebabkan rata rata kenaikan unit biaya angkutan laut BBM domestik dari 363 Rp/Liter menjadi 586 Rp/Liter. Namun, proses internalisasi ini akan membuat penyedia jasa angkutan terhindar dari pengeluaran yang tidak terencana akibat eksternalitas	Persamaan : - Membahas tentang Eksternalitas Perbedaan : - Objek penelitian - Tujuan penelitian - Lokasi penelitian Metode penelitian
---	--	--	--	--

2.3 Kerangka Pikir Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui aktifitas industri pemotongan kapal yang berada di Desa Tanjung Jati Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan. industri ini beroperasi dalam bidang besi tua yang melakukan pemotongan kapal tua dan akan dijual dalam bentuk bongkahan besi. Industri tersebut mempunyai peranan dalam pembangunan ekonomi daerah. Serta adapun dampak yang ditimbulkan oleh industri pemotongan kapal tersebut salah satu dampak positif yaitu adanya penyerapan tenaga kerja, dan dampak negatif dari industri tersebut adalah adanya pencemaran udara yang mengganggu masyarakat sekitar dan lokasi keberadaan industri pemotongan kapal tersebut berdekatan dengan pemukiman warga. Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pasal 3 yang menjelaskan bahwasanya pemerintah harus menjamin terwujudnya pemukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat aman dan berkelanjutan. Namun tidak ada tindak lanjut dari pihak pihak terkait dan pihak pemerintah perihal pemotongan kapal yang sangat mengganggu masyarakat setempat.

Pada hakekatnya pengendalian eksternalisasi ini dilakukan supaya hal ini termasuk dalam biaya produksi atau internalisasi eksternalitas yang tetap menjaga kualitas kehidupan ekonomi masyarakat

Berdasarkan landasan teori pada tinjauan pustaka serta rumusan masalah, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

